BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum sangat penting dan menempati posisi yang strategis di dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai dasar hukum yang hendak diwujudkan adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Begitu pula halnya dengan persoalan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak yang semakin hari semakin banyak terjadi, maka perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum mewajibkan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi menghendaki suatu pengaturan hukum yang mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang merupakan cita hukum bangsa.

Sangat diperlukan kerjasama antara penegak hukum, masyarakat, dan para pejabat/penyelenggara negara untuk melaksanakan komitmen melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak baik aparat penegak hukum maupun masyarakat luas.

Mengapa demikian? karena akibat dari kejahatan seksual ini si korban anak bisa mengalami trauma seumur hidup sehingga merugikan hidup anak itu sendiri juga merugikan negara dan bangsa sebab seperti kita tahu bahwa anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan ke depan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan.

Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana Undang-Undang tersebut memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak-hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada belum memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.

Setiap tahunnya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia terus meningkat, namun hukuman yang dijatuhkan oleh pihak Pengadilan berupa pidana dan denda berupa uang sekian juta rupiah masih sangat terfokus pada pelaku dan sama sekali tidak berorientasi pada kepentingan dan keadilan bagi korban. Denda yang ditetapkan berupa uang sekian juta rupiah akan dibayarkan ke kas Negara dan sama sekali bukan untuk kepentingan korban.

Anak korban kekerasan seksual tetap akan merasakan kepedihan dan trauma seumur hidup atau bahkan menjadi bagian lingkaran setan karena suatu saat di usia tertentu anak korban kekerasan seksual ini bisa berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual.

Dalam pengalaman penulis, korban tetaplah korban, yang secara hukum, ketika kejahatan kekerasan seksual yang dialaminya kemudian telah diproses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap, selamanya korban tetap menyandang label atau distigma sebagai korban anak kekerasan seksual.

Peristiwa tindak pidana yang dialami korban akan terus menjadi label si anak sampai akhir hayatnya, dan traumatiknya sulit disembuhkan walaupun telah menjalani terapi sejak korban menerima pendampingan hingga kasus telah selesai dalam proses hukum.

Dalam hal ini negara belum banyak berperan. Negara, selain menyediakan perangkat peraturan perundang-undangan seperti yang termaktub di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian terbit undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Negara, dari orde ke orde sejak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas diundangkan, belum memikirkan bagaimana penanganan dan pendampingan seorang anak korban kekerasan seksual pasca-proses peradilan telah berkekuatan hukum tetap.

Negara belum mencari solusi terbaik bagi korban, yang secara fisik dan psikis mengalami kehancuran. Negara, barangkali belum melakukan perencanaan melalui riset, bagaimana seharusnya kehidupan anak korban kekerasan seksual pasca proses peradilan? Bagaimana sekolahnya? Apakah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah masih tetap member semangat untuk bersekolah? Atau sekolahnya putus sesudah peristiwa pilu yang dialaminya? Dikeluarkan dari sekolah tempat selama ini berjuang mendapatkan kegembiraan sesuai umurnya? Atau sekolah berbesar hati tetap mengayomi anak didiknya yang telah mengalami kekerasan seksual, suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya?

Maka menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai **“Tinjauan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan Negeri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana/pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Secara praktis

Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Terminologi

Untuk memudahkan pembacaan maka terminology akan disajikan dalam bentuk table seperti di bawah ini:

NO.	ISTILAH	ARTI/KETERANGAN
1.	Tinjauan	<p>tinjauan/tin·jau·an/ <i>n</i></p> <p>1 hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya): ~ nya meleset;</p> <p>2 perbuatan meninjau: <i>buku itu banyak mengandung ~ sejarah;</i>¹</p>
2.	Hukum	<p>hukum/hu·kum/ <i>n</i></p> <p>1 peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;</p> <p>2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;</p> <p>3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;</p> <p>4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;²</p> <p>Van Vollenhaven:</p>

¹ <https://KBBI.Web.Id./Tinjau>

² <https://KBBI.Web.Id./Hukum>

		<p>Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya.³</p> <p>Capitant:</p> <p>Hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.⁴</p>
3.	Pemidanaan	<p>pe·mi·da·na·an/ n proses, cara, perbuatan memidana;⁵.</p> <p>Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.</p> <p>Barda Nawawi Arief:</p> <p>Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana).⁶</p>

³ H. Riduan Syahrani, S.H., "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" Citra aditya Bakti, 2013, hal.16

⁴ Drs. Sudarsono, S.H., "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Rineka Cipta, 1991, hal.1

⁵ <https://KBBI.Web.Id./Pidana>

⁶ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

4.	Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang yang melakukan suatu perbuatan; 2. Pemeran; pemain (sandiwara dsb); 3. Yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu;⁷ <p>pengertian pelaku menurut undang-undang :</p> <p>Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu : “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.</p> <p>Pelaku (dader) : Orang yang melakukan perbuatan secara langsung.</p> <p>Mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan disebut Ask Dader.</p>
----	--------	---

⁷ [https://KBBI. Web.Id./Pelaku](https://KBBI.Web.Id./Pelaku)

		<p>Mereka yang melakukan tindak pidana (zij die het feit plgeen) terhadap perkataan ini terdapat beberapa pendapat :</p> <p>Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (zij die het feit plgeen) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (alleendaderschaft)</p> <p>Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zij die het feit plgeen ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.⁸</p>
5.	Tindak Pidana	<p>1. Menurut J. Baumann:</p> <p><i>Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne</i> adalah “<i>die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung</i>” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).</p> <p>2. Menurut Karni :</p> <p>Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut</p>

⁸ <https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>

		<p>dipertanggungjawabkan.</p> <p>3. Menurut Wirjono Prodjodikoro:</p> <p>Tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.</p> <p>4. Menurut Moeljatno :</p> <p>Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹</p>
6.	Kekerasan Seksual	<p>Kekerasan seksual adalah isu yang penting dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada khas bagi perempuan. Seperti dalam persoalan ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan yang diperparah adalah yang memiliki kendali terhadap korban seperti faktor ekonomi, penerimaan masyarakat, sumberdaya termasuk pengetahuan.</p> <p>Kekerasan seksual termasuk bentuk yang paling kelihatan sampai bagi kalangan menilai Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat darurat.¹⁰</p> <p>Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun</p>

⁹[https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-tindak pidana](https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-tindak-pidana)

¹⁰ • <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

		<p>(2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Usia korban ditemukan semakin muda yakni antara usia 13–18 tahun.¹¹</p> <p>Bentuk 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013),yaitu :¹²</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkosaan 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan 3. Pelecehan Seksual 4. Eksploitasi Seksual 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual 6. Prostitusi Paksa 7. Perbudakan Seksual
--	--	---

¹¹ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160516_indonesia_kekerasan_seksual

¹² <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan-Seksual1.pdf>

		<p>8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung</p> <p>9. Pemaksaan Kehamilan</p> <p>10. Pemaksaan Aborsi</p> <p>11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi</p> <p>12. Penyiksaan Seksual</p> <p>13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual</p> <p>14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan</p> <p>15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.¹³</p> <p>Kekerasan Seksual Menurut UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:</p> <p>“Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual , pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai; Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain</p>
--	--	---

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual

		untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu” ¹⁴
7.	Anak	<p>Menurut Wikipedia :</p> <p>Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.</p> <p>Menurut Psikologi: anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.¹⁵</p> <p>Menurut beberapa Undang-Undang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang

¹⁴ UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 8

¹⁵ Fase fase Perkembangan Manusia di Wayback Machine (archived 2014-01-08)

		<p>Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU RI No.21 tahun 2007 ttg pemberantasan tindak pidana perdagangan).</p> <ol style="list-style-type: none">2. “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun” (UU No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan).3. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “ (UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4).4. “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
--	--	---

		<p>5. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “ (UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1).</p> <p>6. “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”(UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Anak).</p> <p>7. “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Konvensi Hak-hak Anak)</p> <p>8.”Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” (UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5).</p>
--	--	---

		<p>9. Sedangkan Pengertian Anak menurut agama Islam adalah sebagai berikut:</p> <p>“Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikatagorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban”.</p>
--	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara” ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis yang mana data yang diperoleh penulis dapat dipertanggung jawabkan baik itu data primer maupun data sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Metode dan/atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis atau pendekatan *Socio - Legal Research*.

Penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau disebut juga social legal research akan dilakukan dengan pendekatan *field-research* berupa observasi, wawancara dan pendokumentasian kasus-kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah menggunakan *deskriptif analitis*. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Penggambarannya berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan mengenai pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jepara, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut ada relevansinya dengan nilai keadilan bagi korban.

3. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau penelitian hukum nondoktrinal / *socio - legal research* untuk menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam hal kajian tentang penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap.

4. Jenis dan Sumber Data.

Pada penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau *Socio Legal Research* ini penulis mempergunakan Jenis dan sumber data, yang terdiri atas :

- a. Data primer, yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri kabupaten Jepara, data dari LPP Sekar Jepara, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara serta kepada para Relawan Pendamping Korban Kekerasan Anak yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer yaitu menggunakan diantaranya Norma Dasar

Pancasila dan UUD Negara RI 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Bahan Hukum skunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli.
3. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, opini masyarakat yang ada di majalah, Koran atau media lain yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan menginventarisasi data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penelitian ini melalui riset lapangan. Melakukan wawancara kepada para Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara yang telah melakukan persidangan dan memutuskan perkara tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa anak korban korban kekerasan seksual yang perkaranya telah mendapatkan keputusan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara. Selain itu penulis juga akan melakukan observasi dan pendokumentasian terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara.

2. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang telah dipilih sesuai dengan bahasan tentang pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode analisis *Deskriptif Kualitatif* yang dilakukan setelah sumber data

tersebut terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas, dan selanjutnya akan ditarik gambaran kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

Selain itu, metode yang digunakan juga akan dilengkapi dengan analisis yuridis, yaitu dengan cara meneliti, mencari, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun lingkup teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, untuk kemudian dipilih dan disusun dalam rangka mendapatkan jawaban atas rumusan permasalahan yang akan dibahas sekaligus menarik kesimpulan atas pembahasan tentang pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah dilakukan

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan;

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan hukum pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara;

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam Skripsi ini. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jepara. Dan apa saja hambatan yang dialami oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jepara dalam melakukan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Jepara.

Bab IV yang merupakan Penutup. Pada bab ini diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, yang selanjutnya diberikan saran-saran yang diperlukan

mengenai Pelaksanaan Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; serta daftar pustaka.